

Lampiran 17: Framework Matrix Wawancara tentang Budaya Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

Nama	F1. Senang Keterbukaan dan Sosialisasi Informasi	F2. Pola Komunikasi dan Integrasi yang Aspiratif	F3. Berorientasi dan Komitmen Melayani	F4. Tim yang Solid tanpa Ego Sektoral	F5. Taat Aturan dan Lebih Loyal kepada Organisasi
7 : Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T.	<p>Kita sosialisasinya ada bentuknya adalah penerbitan surat edaran kepada semua OPD untuk menyusun dokumen Pra-RKA atau Pra Rencana Kegiatan Anggaran. Jadi, itu kalau di PPAS itu kan sudah tertuang sebuah program itu terdiri dari kegiatan apa saja. Kemudian masing-masing kegiatan itu penganggarnya berapa. Nah, ketika PPAS sudah jadi kami lampirkan PPAS itu di dalam surat edaran ke masing-masing OPD, kita minta OPD untuk menyusun Pra RKA mendasari PPAS yang kita lampirkan gitu. Dan itu tahapannya biasanya di bulan Mei, iya.</p> <p>Ketika Musrenbang Kecamatan sudah di sepakati hasilnya seperti apa, hasil Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD dibawa ke Musrenbang Kabupaten. Artinya Musrenbang Kabupaten itu tidak semata-mata hanya dari usulan SKPD Kabupaten. Tapi, sudah apa ya, nggih, monggo, monggo, iya, oh, ya ke bidang mana? Oh, iya, iya, nggih, nggih, makasih ya Mbak, iya. Artinya yang dibahas di Musrenbang Kabupaten itu sudah tidak hanya usulan dari SKPD. Tapi, sudah me--, apa ya, enak, istilahnya itu, sudah mengambil dari aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan tadi. Bahkan ketika di sejak Musrenbang Kecamatan pun kita sudah menghimbau kepada kecamatan untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran dewan. Jadi, pokok-pokok pikiran Dewan itu sudah diolah sejak di Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Artinya lagi sumber, sumber perencanaan penganggaran itu sudah dari desa,</p>	<p>Ketika okelah di akuntansi ndilalah, kebetulan juga lolos karena tidak cermat juga, nanti oleh pemeriksa BPK nanti yang akan (tertawa). Tapi, sebenarnya sebelum, nggih Mbak, sebelum itu, oh ya monggo Mbak, nih, makasih ya Mbak, iya, hati-hati ya. Nanti ketika belum sampai seharusnya belum, ketika belum sampai di tahapan pemeriksa kami harus, maksudnya harus mengevaluasi diri.</p> <p>itu pencermatannya oleh Bapeda. Kalau kami kemudian ngathukke dengan penjabaran di dalamnya. Misalnya di atas penulisannya dia keluarannya apa ya misalnya, misalnya pelatihan, latihan kerajinan bambu misalnya Deperindag ya. Tapi, di dalamnya dia tidak ada belanja material untuk pelaksanaan atau belanja bahan materi untuk pengadaan, pelatihan bambu. Pada waktu pelatihan kan mesti membutuhkan bahan-bahan.</p> <p>Materi mungkin apa, bambunya, mungkin peralatan pisaunya dan sebagainya. Loh, nanti kita konfirmasi, Njenengan atau SKPD mau mengadakan pelatihan kerajinan batu tapi kok di belanja Njenengan nggak mengadakan belanja materi, material bahan untuk pelatihan bambu. Nanti pada waktu pelatihan itu mau, mau namanya pelatihan kan pasti ada yang dikerjakan.</p> <p>Misalnya saja yang baru sekarang ini kami terima, itu ada surat dari Sekda Provinsi bahwa kami ternyata di APBD Provinsi DIY itu kami mendapatkan bantuan khusus keuangan BKK Bantuan Keuangan Khusus dan itu tercantum di APBD DIY artinya itu sudah legal untuk dilaksanakan. Nah, kami di APBD kami bantuan keuangan khusus itu belum tercantum. Nah, kami harus mencantumkan pendapatan dari BKK DIY itu dari sisi pendapatan dan dari sisi belanja kami harus menuangkan belanja, penganggaran belanjanya sesuai juknis yang</p>	<p>Jadi, dia harus SKPD, eselon 2 dengan perangkatnya itu punya kewenangan untuk menentukan prioritas SKPD-nya itu dari 1 sampai 15M tadi. Kalau ada yang tidak terdani dari 15 ke 20M seharusnya itu yang tidak prioritas begitu.</p> <p>Jadi, dia harus pandai-pandai mengelola uang anggaran, supaya yang terbiayai adalah yang prioritas begitu.</p> <p>Memang kalau dipertimbangkan dari sisi kemampuan keuangan daerah, kami di Kulon Progo itu kan termasuk daerah yang PAD-nya kecil. Sehingga kami memang harus pandai-pandai mengelola anggaran dimana yang dibiayai hanya yang prioritas.</p> <p>Dan itu kebutuhan yang mendasar dan itu ada, ada panduannya dari ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>Yang diutamakan adalah yang memenuhi standar pelayanan minimal. Kemudian yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yang memenuhi kebutuhan kan ada, ada kriterianya ya.</p> <p>Kebutuhan dasar, kebutuhan pendukung itu kan ada kriterianya saya lupa di peraturan mana.</p> <p>Itu sudah tidak ada missed, sudah tidak ada perbedaan antara pendampingan dari Bappeda dengan kami di BKAD. Artinya itu sudah nge-link, sistem itu sudah nge-link itu memang sangat, sangat membantu kami terutama ketika menghadapi SKPD yang tanda petik kadang-kadang dia punya mau.</p> <p>Ketika di, ketika ketemu dengan Bappeda anu, oke, oke, oke, nanti ketika mau dipindah ke Simda karena ada rentang waktu dia nyisipkan apa.</p> <p>Bisa jadi ketika di Bapeda dia koor</p>	<p>Iya.Jadi, sebenarnya itu lebih distresingkan oleh Bappeda. Jadi, output, outcome, benefit, impact.</p>	<p>Kita selalu mengacu mempedomani peraturan baik itu peraturan undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah bahkan bila sudah tertuang dalam peraturan daerah tentu itu menjadi panduan kami untuk menyusun penganggaran.</p> <p>Itu mengikuti prioritas dan tematik pembangunan daerah dan itu sudah terumuskan sejak dari penyusunan RKPDP Rencana Kerja Pemerintah Daerah kemudian kebijakan umum anggaran.</p> <p>Sebelum berproses di, sebelum berproses di bidang saya. Jadi, penyusunan perencanaan penganggaran itu kan dari RKPDP.</p> <p>Kemudian ke KUA PPAS. Kemudian ke APBD. Nah, ketika KUA PPAS, saya lupa bulan Mei minggu ke berapa tapi ini bulan Mei, bulan Mei, ada ketentuannya minggu ke berapa begitu. Ini kita ambil lampirannya, kita cuplik per OPD.</p> <p>Di dalam lampiran PPAS itu ada nomor program kegiatan kemudian kemudian kemudian, sasaran atau keluaran rupiah berapa. Nah, ini kita cuplik per SKPD, kita cuplik per SKPD. Kita sampaikan, kita sampaikan mendasari, mendasari cuplikan PPAS ini minta supaya SKPD menyusun Pra RKA. Artinya apa, tahapan kami adalah tahapan ketika KUA PPAS di</p>

<p>kecamatan, pokok-pokok pikiran dewan dan SKPD dari 4 aspek itu. Nah, yang membahas di Musrenbang kabupaten itu, bukan hanya Musrenbang kabupaten ya, sejak di, sejak kecamatan Forum SKPD dan pokok-pokok pikiran dewan itu dibahas sudah dengan melibatkan masyarakat. Kami pasti mengundang unsur masyarakat ketika perencanaan. Meskipun ini nanti di Bapeda ya.</p> <p>Iya, lewat kulonprogrokab dan ini dengan sistem itu tadi jadi desa maupun kecamatan itu, oh, ya monggo, monggo, desa dan kecamatan bisa membuka sistem RencanaKu itu.</p> <p>Pra RKA, RKPD itu sudah, sudah tertuang di RencanaKu. Nah, nanti di RencanaKu, dipastikan lagi karena ini masih indikasi ya yang di, yang di RKPD kan masih indikasi. Nanti Rupiah keluaran outputnya akan ada semacam DES, DES atau pencermatan dari Bapeda yang mencermati penjabaran kegiatan itu dibelanjakan untuk apa, sosialisasi misalnya sosialisasi untuk, itu untuk berapa orang seperti itu pencermatannya. Nanti untuk memperbaiki Pra RKA yang sudah di RencanaKu. Jadi, ketika ada di situ sudah menghadap sistem, oh, ini dicoret, oh, ini dikurangi, oh ini harus ada tambah keluaran apa misalnya sosialisasi. Tapi, kok tidak ada buku panduan sosialisasinya atau materinya apa sosialisasi kok tidak ada materinya. Nah, itu yang ditambahkan. Hal seperti-seperti itu berprosesnya di Bapeda, di Bapeda dengan menggunakan sistem RencanaKu. Nah, nanti ketika di APBD di saya itu sudah menggunakan sistem yang berbeda namanya Simda,</p>	<p>diterbitkan oleh SKPD DIY. Nah, kami sudah terima informasi BKK-nya ini untuk SKPD mana nilainya berapa, sarannya apa, itu sudah. Tapi, kami masih menunggu juknis dari SKPD DIY. Nanti kalau dari juknis dari SKPD DIY sudah jelas, kami baru berani menuangkan di penjabaran belanjanya supaya nggak keliru.</p> <p>Nanti mau ngapain, nah, misalnya. Terus dijawab oh nggak ada, itu nanti kelompok sudah siap untuk berswadaya misalnya beliau oh ya sudah, kalau sudah dijalankan seperti itu artinya meskipun tidak ada belanja bahan materi, kegiatan tetap akan bisa berjalan karena sudah ada kesepakatan antara dinas dengan kelompok sasaran misalnya begitu. Atau misalnya untuk kegiatan pengadaan bibit, pengadaan bibit ini volumenya sekian, tapi di dalam perincian tidak terlihat ini sasarannya siapa.</p> <p>Sasarannya misalnya petani kopi, pengadaan bibitnya kok pengadaan bibit misalnya padi, sasaran kelompoknya kok petani kopi ini yang benar, benar nggak? Oh, iya, mohon maaf perlu dikoreksi. Nah, pencermatan-pencermatan itu kami mencocokkannya di belanjanya, di belanja.</p> <p>Sejak perencanaan, nah, itu sudah kami lakukan sejak tahapan Musrenbang Desa. Jadi, Musrenbang Desa itu dilaksanakan dengan mendasari surat edaran dari TAPD yang mana di surat edaran TAPD itu sudah ada guidance tematiknya. Artinya desa akan menuangkan APBDes-nya itu sudah mengacu kepada tematik yang tematik prioritas pembangunan yang diangkat oleh bupati. Kemudian Musrenbnag Des ditindaklanjuti oleh Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Kecamatan otomatis juga mengacu, mempedomani prioritas pembangunan bupati itu. Itu melibatkan semua unsur masyarakat ya.</p> <p>Jadi, ada eee unsur non-PNS-nya, unsur non-PNS itu kita bagi ke dalam beberapa sektor. Misalnya sektor kesehatan dan pendidikan.</p>	<p>pencermatannya hanya kepada optimalisasi penggunaan anggaran supaya tepat keluaran kemudian terhadap benefit dan impact-nya bisa tercapai. Kalau di kami lebih ke pemanfaatan sampai detail Rupiahnya.</p> <p>Nah, kembali ke prioritas dan tematik pembangunan daerah tadi. Jadi, sebuah SKPD kan dia punya koor ketugasannya, dimana koor ketugasannya yang menjadi pokok tupoksinya dia ya itu yang harus dia biayai.</p> <p>Ini pelaksanaannya mau bulan apa. Kalau bulan misalnya pengadaan fisik infrastruktur jalan, dia miskinnya menghindari ketika musim penghujan. Nah, hal-hal itu untuk optimalisasi, apa, hasil, benefit dan impact tadi jangan sampai misalnya di pertanian pengadaan bibit. Musim panennya sudah lewat baru dia menjadwalkan pengadaan bibit kan tidak relevan.</p> <p>Jadi, penuangan belanjanya harus lewat juknis kan. Nah, kalau sudah fix sesuai ketentuan juknis baru kami nanti mengadakan perubahan APBD, begitu. Mendahului perubahan karena kalau perubahan normatifnya kan nanti bulan Juli.</p>		<p>Bapeda itu sudah final, sudah fix baru kami menerbitkan surat edaran, bentuknya surat edaran dari TAPD.</p> <p>Kepala Kepala SKPD, memerintahkan Kepala SKPD supaya menyusun Pra RKA sesuai PPAS yang dicantumkan. Nah, itu dari sisi, apa ya, prosedur persuratan ya. Tapi, dari sisi, sistem kita sebenarnya di Kulon Progi punya RencanaKu. RencanaKu itu Rencana Kulon Progo itu sistem perencanaan dimana sejak tahapan RKPD itu sebenarnya sudah terlihat indikasi anggaran per program, per kegiatan sehingga di RencanaKu ini sudah, sudah ada Pra RKA. Jadi, Pra RKA, RKPD kalau kami istilahnya kemudian.</p> <p>Soalnya kalau tidak nanti ketika APBD sudah, sudah diundangkan menjadi Perda dan penjabarannya oleh Perbub, Peraturan Bupati nanti kita SPJ-nya kan pasti harus mengacu DPA itu.</p> <p>Artinya ada ketentuan di atasnya yang membutuhkan kami menyesuaikan dengan pergeseran mendahului perubahan. Misalnya ada juknis DAK, DAK-nya sudah tercantum di APBD, tapi ternyata secara juknis dari kementerian teknis mengubah. Jadi, yang sebelumnya belanja langsung ternyata diminta ke belanja tidak langsung. Nah, itu kami</p>
--	--	--	--	--

<p>Njenengan pasti sudah familiar ya. iIya, yang dari BPKP. Nah, ini tahun, tahun ketiga atau tahun keempat ya. Kami mensinergikan dari RencanaKu ke Simda.</p> <p>Jadi, apa yang sudah berproses di RencanaKu itu nanti di, dikoneksikan ke Simda sehingga ketika kami mengawal Pra RKA, SKPD sesuai surat edaran yang saya sampaikan tadi.</p> <p>Ketika RencanaKu dan Simda sudah terkoneksi, hal-hal seperti itu sangat-sangat bisa diminimalisir. Mungkin itu ya, jadi, jadi kami memang penyusunan APBD itu memang tidak serta-merta berdiri sendiri karena sudah ada proses sebelumnya di Bapeda sejak dari RKPD dan KUA PPAS. Bahkan mungkin 30% atau 50% pekerjaan penyusunan APBD itu sudah tertuang di Bappeda. Tapi, tapi itu anu ya, belanjanya. Tapi, kalau di BKAD kami kan selain belanja juga ada pendapatan.</p> <p>Jadi, apa yang tertuang di Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan itu nanti terakomodir juga di RencanaKu. Dia bisa ngecek usulan kecamatan dari Kecamatan A itu masuk nggak ya ketika mengusulkan perbaikan jalan dia bisa ngecek di eee di SKPDPU. Ruas jalanku muncul nggak ya dibangun nggak ya, itu bisa ngeklik di RencanaKu, bisa ngecek, nggih. Tapi, yang, yang bisa diakses oleh publik itu memang RencanaKu.</p>	<p>Itu nanti ada organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan. Misalnya IDI Ikatan Dokter, IBI Ikatan Bidan. Kemudian PGRI, kemudian kalau di pendidikan itu ada Persatuan Guru juga ada, apa, Perga Belajar Perwakilan Warga Belajar ini yang mengikuti kelompok Paket A, Paket B, Paket C itu. Nah, wakil-wakil masyarakat ini pasti kita undang di dalam proses perencanaan.</p> <p>Dengan kita mengundang masyarakat luas, adanya kita sudah--</p>			<p>juga harus menindaklanjuti. Nah, dasar kami adalah Permen Peraturan Menteri Teknis yang mengatur tentang juknis penggunaan DAK bidang tertentu sesuai teknisnya ke teknisan kementerian itu. Jadi, ketika ada peraturan-peraturan di atasnya yang mengamankan kami untuk menyesuaikan di APBD ya kita tindak lanjuti.</p>
---	--	--	--	--

8 : Drs. Nur Hadiyah, M.Acc.

Eehh sebenarnya bukan resisten permasalahannya. Tapi masalah ini sosialisasi. Kadang-kadang kalau ada aturan baru kemudian ternyata kita itu sudah biasanya, ha ha ha. Manajemen biasanya ada T orang jowo itu ha ha. Manajemen ada T itu ya masalah sosialisasi saja sebenarnya. Kalau memang ada aturan baru dan tersosialisasi dengan baik, saya kira akan patuh. Tapi karena biasanya sudah seperti ini, terus ada aturan baru kita tidak tahu, ya sudah celaka itu, he he he. Iya, celaka, betul. Konsekuensinya besar itu kemaren. Pengalaman kita 2017 itu gara-gara manajemen ada T biasanya seperti ini ternyata ada aturan baru itu kita jadi serapan DAK fisik paling rendah se-DIY, kita rugi 11 milyar. Itu kan itu, jadi biasanya DAK fisik itu per triwulan itu kita bisa mengajukan kontrak pencairan-kontrak pencairan, seperti itu ya, nah kemarin itu ada aturan baru, PMK 50, pengisian data kontrak paling lambat pada triwulan kedua, itu untuk sepanjang tahun. Artinya triwulan 3, triwulan 4 itu kita sudah tidak bisa lagi mengisi data kontrak. Lah karena biasanya itu boleh kita mengisi ternyata aplikasinya dikunci, baru ribut sih, lah tidak bisa diisi, ha ha...hangus. Jadi biasanya-biasanya itu kadang-kadang kalau, bukan resisten ya tapi memang sosialisasinya yang kurang pusi. Ya memang kita jadi belajar dari situ tapi nilai atau harganya terlalu tinggi, kita belajar lagi, he he he.

Tidak ada. Tidak ada. Yang pasti, saya kira komunikasinya cukup baik. Jadi kalau ada pertentangan mbak Sri, mbak Eka kalau saya anggap bisa selesaikan di tingkat bidang begitu. Tidak sampai ke atas. Lebih sering tidak sampai ke atas. Tapi kalau memang ada hal-hal yang penting seperti plakantas sehingga kalau saya tidak bisa mengambil sikap/keputusan, baru ke atas.

Eeeh, pertentangan tidak, kalau beda pendapat terhadap suatu hal sering. Tapi kadang-kadang misalnya saya dengan mbak Sri (kasubid belanja) satu SKPD. "ini kalau seperti ini boleh tidak" saya bilang "boleh". Ternyata mbak Sri bilang "tidak". Wah ini bagaimana ini, ha..ha. jadi memang itu harus didiskusikan.

Antarbidang juga iya. Karena tugas-tugas di BKAD itu sifatnya mengalir/saling keterkaitan. Dari rencana penganggaran, perbendaharaan, nanti di apa sana Aklap (akuntansi dan pelaporan). Kadang-kadang kalau ada masalah itu "loh ini masalahnya dimana?" Tahu-tahu dilimpahkan kesini loh, "itu masalahnya bukan masalah disini, bukan masalah keperbendaharaan, tapi masalah perencanaan". Nah kita sampaikan ke sana. Kadang ketika simda trouble begini-begini, loh ini bukan masalah perbendaharaan tapi masalahnya pelaporan. Jadi kita antar ke sana. Nah ini yang sering jadi apa, ya bukan saling lempar, saling cuci tangan. Tapi identifikasi masalah ini yang keliru sehingga apa yang diberi tugas untuk menyelesaikan juga kadang-kadang salah. Misalnya ada pergeseran anggaran, nah ini teman-teman ini belum apa kadang-kadang salah memahami antara aliran kas (cash flow) dengan anggaran kas (cash budget). Itu kan satu hal yang berbeda tapi ketika ada pergeseran kas, ada surat dari SKPD itu dilimpahkan ke sini. Ini yang diminta itu bukan masalah cash flow-nya kita untuk itu walaupun di sana itu mengambil keputusan apakah menyetujui pergeseran anggaran kas itu setuju atau tidak harus ada pertimbangan dari perbendaharaan,

Terus kemudian ya saya kira secara umum budaya kerja birokrasi itu mungkin secara nasional juga berubah ya. Artinya kalau dulu kan kita ini dianggap sebagai rent seeker (pemburu rente) untuk keuntungan pribadi, he..he. Nah sekarang itu kan apa, cenderung bahwa kewenangan tugas-tugas yang diberikan, keuangan yang diberikan itu eeee, dianggap sebagai peluang untuk bisa meningkatkan kesejahteraan diri sendiri begitu. Tapi sekarang itu dengan saya kira dengan perkembangan hukum dan sebagainya kemudian aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan daerah itu saya kira budaya rent seeker itu sudah pemburu rente itu apa ..sudah ter apa, terkikislah. Soalnya bagi kita itu melaksanakan tugas yang betul-betul sebagai apa abdi masyarakat, abdi negara memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya itu selalu ditekankan. Terutama pak Hasto ini di setiap apel itu selalu memberikan bahwa kita ini pelayan masyarakat, artinya bahwa sebenarnya dengan kita menjadi pelayan, dengan kita menjadi PNS birokrasi di pemerintah daerah itu justru ada peluang yang lebih bagi kita untuk berbuat baik kepada masyarakat. Nah orang kan sering keliru, dulu ketika jadi PNS, pegawai di pemda semacam ini, ee mungkin terlalu sibuk dengan tugas-tugas dia tidak menempatkan diri untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Tapi begitu pensiun malah ingin jadi ketua RT, ingin jadi pengurus yayasan, he..he..he dan sebagainya untuk mengabdikan kepada masyarakat. Begitu kan. Ya dulu kemana? Iya to..ha..ha, ketika jadi PNS ya begitu tidak memberikan, justru dia ketika jadi PNS kan punya kewenangan melayani masyarakat yang sebaik-baiknya. Tapi hi..hi pas pensiun baru mulai terpikirkan jadi pengurus yayasan, jadi ketua RT, kepala RW, begitu kan. Nah ini yang ditekankan seperti itu. Justru mumpung masih aktif/masih ada waktunya untuk berbuat baik, kesempatan punya kewenangan, ya itu hilang begitu.

Eehh... waduh kalau seingat itu saya kurang

Tidak. Kita team work. Jadi eehh kebetulan memang orangnya terbatas ya, kita itu kurang. Jadi kalau ketugasan modelnya terus egosentris seperti itu tidak jalan. Tidak bisa. Jadi kalau anu ya harus bersama-sama. Jadi saling mengisi. Misalnya di tempat mbak Ita itu stafnya cuma dua, harusnya kan empat. Kurang. Nah kekurangannya ini kadang-kadang diambil alih tugas mbak Ariani (staf) dari seksi pengelolaan kas.

Tidak. Tidak bisa seperti itu. Kalau masalah pencairan itu sudah diatur dalam sisur di perbup. Jadi antara mbak Sri, saya, dan pak Kepala itu tidak boleh semuanya bersama-sama meninggalkan kantor. Jadi kalau pak Kepala pergi, mbak Sri pergi, saya tinggal di kantor. Atau kalau saya, pak Kepala pergi, mbak Sri harus tinggal di kantor. Tidak bisa kosong. Tidak bisa, tidak boleh. Tidak ada yang berangkat sama-sama. Ada ketentuan soalnya. Di SPM, Standar Pelayanan Minimal kita tentang pencairan itu 2 x 24 jam harus selesai.

Eehhh, kita memang ada aturan kebersamaan yang lebih internal, itu diatur, walaupun apa, semacam konvensi ya, aturan tidak tertulis, ini sekretariat yang atur, paling paham. Artinya jangankan yang mempunyai hajat, kalau yang punya hajat ya kita ikut budayanya lah, misalnya pernikahan atau khitanan anaknya itu kadang-kadang yang diundang ya kita datang ke sana. Kemudian yang sakit, tapi syaratnya sakitnya lebih dari dua hari dan diopname di rumah sakit. Ya itu ada konvensi-konvensi semacam itu untuk kebersamaan tadi.

Pasti tercapai. Karena memang ada satu atau dua orang dalam jam kerja itu kadang-kadang suka pomat-pamit gitu kan. Anu saya pagi itu pamit, ini dulu, antar anak dulu lah, ada urusan apa dulu lah, itu. Tapi nanti mereka akan anu sendiri, memperhitungkan sendiri kompensasinya ke jam kerja. Nanti pulang kerjanya agak lambat, digeser waktunya. Biasanya pulangannya agak sore. Kalau tugas-tugas tertentu, mereka harus lembur ya tetap dilaksanakan. Dulu pernah mereka pulang malam jam 11 malam, jam 2 malam, demi menyelesaikan tugas. Padahal ibu-ibu semua, ha,ha, pulang jam 2. Suaminya datang menyusul. Kan tidak berani pulang sendiri. Demi menyelesaikan tugas. Artinya kalau memang itu harus selesai besok, memang harus selesai, ya apapun yang terjadi pasti diupayakan untuk diselesaikan.

Inggih. Ya. Ini yang contoh gampang saja. Memang awal 2018 kemaren ada pergantian pimpinan. Ya kita itu kan apel pagi lah yang gampang. Dulu ketika pimpinan lama, apel pagi itu rajin. Dia lebih menekankan untuk apel dan sebagainya. Kemudian ganti pimpinan, pimpinan baru dia tidak urus apel tapi tetap apel, ha..ha..ha iya. Jadi sudah kebiasaan. Jadi saya kira teman-teman ini sudah lah bahwa loyalitas itu kepada organisasi bukan kepada orang/pimpinan. Wah ini ngomong ada saya atau tidak ada saya ha.ha.ha. Cuma

		<p>kan begitu. Tapi kan itu urusan anggaran itu kan kalau cash budget itu dia rencanakan bulan ini sekian, bulan ini sekian. Itu kan urusannya perencanaan. Cuma ketika dia menggeser itu boleh atau tidak ya kita lihat, wah ini kira-kira nanti pemasukan ketersediaan dananya ke siapa begitu. Kalau itu memang signifikan mempengaruhi cash flow pmda karena ada inflow dan casflow, ada kas masuk, kas keluar, kalau nanti ternyata kas masuknya tidak bisa mencukupi kas keluarnya kan, oh jangan tetap jangan digeser. Jadi masalahnya sesuai dengan identifikasi ketugasan.</p> <p>Biasanya berjenjang. Pasti berjenjang. Misalkan kalau ada masalah ya pasti mbak Sri ke saya dulu. Saya kepala bidang tidak mungkin langsung ke kepala. Kecuali kalau saya tidak berada di tempat. Kadang-kadang tapi nanti pasti diberitahu. Tadi dipanggil Bapak terkait ini, keputusannya seperti ini. Seringnya berjenjang. Paling tidak bersamasama begitu. Nanti staf yang ada masalah sama mas Hartono ini ada masalah eh penerbitan SKPP, ini kok beda antara tanggal SK dengan tanggal yang dipakai yang gitu. Teknis-teknisnya begitu.</p> <p>Inggih. Inisiatif tetap terbatas. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Inisiatif harus dikomunikasikan secara berjenjang. Misalnya yang tadi itu antara tanggal SK dengan tanggal ini beda, ini yang mau dipakai yang mana. Tidak bisa memutuskan sendiri, ya sudah pakai tanggal ini. Jadi kita komunikasikan pakai tanggal SK, kemudian SKPP-nya ada jeda satu bulan, artinya dia tidak terbayar di bulan yang bersangkutan loh ini. Nah semacam itu, kita harus. Intinya anu apa banyak kepala lebih baik dari satu kepala, ha..ha..ha, yang memikirkan. Masalah-masalah siapa pun boleh mengusulkan boleh, berinisiatif tapi tetap dalam pengambilan keputusan tetap di tangan pimpinan.</p> <p>Maksudnya bentuknya apa pengorbanannya itu? Ee eh biasanya jarang ya situasi seperti itu terjadi, artinya bahwa kita mengambil keputusan yang berisiko yang demi</p>	<p>tahu, hu..hu. Saya baru setahun disini. Jadi yang dulu seperti apa, kami tidak bisa membandingkan. Tapi eee ya memang kalau bicara budayanya orang Yogya, orang Kulonprogo, memang apa ya, mereka itu cenderung patuh kok terhadap aturan. Jarang yang terlalu berdiskresi atau terlalu apa. Inovatif bisa tapi inovatif yang dalam koridor aturan, bukan inovatif yang sifatnya mensiasati aturan.</p>		<p>kalau ada hal-hal tertentu pengambilan keputusan kalau ada masalah ya tetap. Cuma pelayanan SP2D, masalah kas ini tetap harus challenge. Cuma mbak Sri itu bagaimana dia mensutradarai, men-direct itu ha.ha jelas direktor kan. Teman-temannya di seksi belanja mbak Ita mensutradarai teman-temannya di Seksi Pengelolaan Kas. Saya mensutradari mereka tetapi secara alir tugas pekerjaan tetap mengalir.</p> <p>Nah itu kadang-kadang saya salah mengambil keputusan atau apa, diprotes. Di sini sudah gak tertutup, seharusnya begini-begini. Tapi saya kan punya pertimbangan sendiri. Eh begini mbak, nah ini akhirnya jadi diskusi untuk menemukan yang terbaik tapi mereka artinya berani untuk diskusilah. Tidak terus yes man, atau ha ha ha. Saya pun dengan pak kepala kalau ini seperti ini keliru, eh kita sowan. Kita datang ke sana. Pak newun sewu, apakah tidak lebih baik ini seperti ini.</p> <p>Maksudnya kesetiaan kepada pimpinan dan organisasi mana yang lebih kuat? Tetap organisasi. Mereka itu berani melawan kok, ha ha ha...iya. Jadi kalau pimpinan bersalah mereka tetap berani. Tetap berani. Tidak ada yang berbakti pada pimpinan. Itu tidak ada. Yang dulu memang ada. Kalau sama pimpinan pokoknya takut. Sekarang sudah, tahun ini sudah gak ada.</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>organisasi itu jarang situasi seperti itu terjadi. Biasanya apa ya yang menguntungkan organisasi itu pasti sesuai dengan aturan itu kalau kita mengambil keputusan yang tidak sesuai aturan itu pasti itu tidak sejalan dengan kepentingan organisasi.</p>			<p>Iya. Ehhh tidak sih, justru ee pimpinan yang baru itu mengakomodir aspirasi dari staf-stafnya. Jadi kalau yang dulu kan mungkin kebijakan itu ada yang diputuskan oleh pimpinan, misalnya seperti apa pegawai yang pensiun itu biar diberikan sekedar tanda terimakasih/kenang-kenangan dari teman. Kalau dulu kan tidak mau, pimpinan yang dulu tidak mau seperti itu. Itu diterima. Kemudian yang tadi yang apel kemudian dipotong insentif itu, itu sebenarnya anak buah ini tidak mau, tapi pimpinan memutuskan kalau kamu tidak apel dipotong sehari Rp50.000, dari insentif itu. Akhirnya ada yang tidak apel 4 kali ya Rp200.000, he he. Tidak apel 3 kali Rp150.000 dipotong walaupun potongannya itu untuk kas kebersamaan tapi sebenarnya anak buah ini tidak suka itu. Kemaren minta supaya kebijakan itu ditinjau.</p> <p>Ehhh seperti itu biasanya di anu, eee ya bukannya kita ini cari aman gitu loh, tapi yang seperti itu selalu diberikan landasan. Jadi harus secara kronologi itu lengkap, jadi ketika eksekusi terhadap satu hal tidak sesuai dengan aturannya harus ada kronologinya kemudian keputusan itu tidak diambil sebagai keputusan pejabat/pribadi tetapi itu diambil sebagai keputusan organisasi. Iya, misalnya apa ya contohnya mungkin yang</p>
--	--	---	--	--	---

					<p>agak menyimpang begitu nah dulu ketika ini umpama ketika ada ini KLB Antrax, pernah dengar kan ada KLB Antrax? Nah itu kan sebenarnya, eee boleh tidak ini mengambil belanja tidak terduga untuk KLB Antrax. Nah ini diceritakan jadi untuk seperti itu harus diseting apa surat menyuratnya, dokumen yang agak seso ono opopo itu, ceritanya jelas, bisa dilacak. Kita minta misalnya Dinas Pertanian melalui surat, kemudian ada SK Bupati yang menyatakan bahwa ini KLB. Kemudian proses-proses seperti itu, harus ada nota dinas kita, harus ada persetujuan. Artinya itu harus terdokumentasi agar semuanya aman begitu. Bukan proses langsung setuju, tanda tangan pencairan tanpa dasar tahap-tahap itu. Jadi bagaimana itu, apa istilahnya itu, itu didorong sebagai suatu, itu tadi keputusan organisasi, bukan keputusan pejabat. Jadi ada kronologinya, oh dulu pernah ada surat dari Dinas Pertanian seperti ini, oh sudah ada kajian menyatakan ini KLB, kasusnya memang benar ini. Jadi tahapan-tahapan itu dibuat, walaupun itu belum ada aturan SOP-nya. Tapi biar suatu saat diperiksa itu ada ceritanya itu, jelas tidak orang terus lempar , uuh tidak tahu itu urusan pertanian, bukan seperti itu tapi sama-sama dibuat agar menjadi suatu kronologi yang jelas yang ada bukti-bukti dokumennya. Jadi intinya itu.</p>
--	--	--	--	--	--

<p>9 : Drs. Sunarya, M.M.</p>	<p>Tapi kami bisa menemukan bukti bahwa ada yang belum dipajakin maka kami akan menerbitkan namanya surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB). Nah itu kami tagih. Semacam itu. Kami ada upaya semacam itu termasuk setiap tahun kami mengadakan sosialisasi sehingga meskipun mereka sudah tahu, ya perlu kita ingatkan terus. Tidak hanya pajak yang saya sebutkan tadi termasuk pajak restoran, pajak air, dan sebagainya.</p> <p>Ohh ada. Ada. Pamvlet kecil-kecil itu loh. Cara menghitung pajak air tanah, cara menghitung pajak reklame, cara menghitung pajak ada semua. Itu sosialisasi kami langsung ke wajib pajak. Ada lagi kami sosialisasi melalui media masa biasanya kerjasama dengan radio lokal. Kemudian sosialisasi dengan memasang iklan layanan publik itu loh mas, kayak billboard-billboard itu loh kan. Ada “bayarlah pajak”, “pembangunan ini berkat pajak anda”.</p> <p>Ohh. Semestinya ada. Teman-teman saya biasanya dalam hal SPj ya, nanti ada SPj itu kan harus ada dokumen bukti kegiatannya. Itu ada. Kalau masalah materi biasanya apa sebelum sosialisasi sudah dibuatkan materi. Kalau sosialisasi itu ada narasumbernya, biasanya narasumbernya mesti diminta. Kalau pun bukan sosialisasi pada wajib pajak retribusi misalnya ke mas media tadi apa, radio lokal tadi, jadi sudah kami bicarakan. Artinya temanya itu sosialisasi itu ini sekarang trus nanti bagaimana sih tema bunyinya apa to, ah itu sudah sebelum keluar. Tidak hanya kami pasrah kepada teman-teman radio lokal, pokoknya ini terserah, gak. Sudah dibicarakan nanti apa yang akan ditampilkan. Itu sudah.</p>	<p>Kalau yang sifatnya klasikal (kelas, pake kelas) itu PBB misalnya, PBB itu 12 kecamatan mas. Dua belas kecamatan sekali. Kemudian kalau penyebaran pamvlet-pamvlet gitu itu gak dihitung bulanan atau kadang-kadang pokoknya misalnya kita mau mengadakan/menengok pendataan baru wajib pajak itu kami kasih misalnya wajib pajak baru yang rumah makan, misalnya kita tidak tahu ada rumah makan baru itu kami berikan pamvletnya, ada kewajiban ini..ini. Seperti itu. Jadi itu tidak ada ikatan berapa kali setahun, tidak ada. Bahkan yang sudah lama pun, sekali bilang lupa kami kasihkan lagi kalau lupa.</p> <p>Oh tidak, kadang-kadang justru kalau misalnya oh ini salah, kami kan sebagai koordinator itu di bidang pendapatan. Setiap bulan SKPD pengelola pendapatan itu berkewajiban menyetorkan SPj fungsional pendapatan ke kami. Di sini ada namanya verifikasi atau validasi. Itu kami dan teman-teman ada membentuk tim untuk itu. Sehingga jika terjadi kesalahan, oh ini bukti pembayaran sekian, tertulisnya sekian, pokoknya ada kesalahan. Itu secara teori/secara SOP-nya ya kami harus mengembalikan lewat berjenjang. Oh ini kami membuat surat dari atasan kami kepala. Kepala nanti dikirim ke kepala pelaksana. Di sini kan juga membutuhkan waktu sehari-hari. Mending dengan keberadaan alat mesin yang canggih. Ini tolong dibetulkan ini. Nah back-up data kemudian menarik laporan itu ke sana. Mungkin tidak sampai sehari sudah jadi. Memang kemudian itu SOP, tapi itu lebih cepat lebih baik. Seperti itu. Daripada kami harus melalui antarkepala itu kan jadi lama. Iya kalau kepala yang di sana itu ada di tempat. Kalau tidak ada ya kami harus menunggu disposisi dan sebagainya, jadi lama. Jadi meskipun yang direvisi oleh SKPD sana dan itu harus tanda tangan kepala, tapi kan lebih cepat, prosedurnya nanti tetap resmi. Seperti itu. Tanda tangannya harus cepat.</p> <p>Ehhhh, kami akan tetap melakukan</p>	<p>Sebenarnya perda kami, baik retribusi maupun pajak daerah itu sudah terselesaikan dengan baik, artinya masyarakat itu tahu ketika melakukan ini harus ada kewajiban ini. itu sudah tahu. Perkaranya di tingkat lapangan. Kemudian justru malah masyarakat sejauh mungkin kalau bisa menghindar misalnya, banyak hal contoh-contoh semacam itu misalnya, eee apa, parkir. Oh, ditengok-tengok gak ada petugas parkir, ya sudah gak bayar atau mungkin dari sisi pajak mineral atau golongan C, karena keterbatasan pengawasan mungkin ada penambang yang menjadi wajib pajak kemudian tidak melaporkan produksi yang seharusnya dilaporkan. Itu kan artinya ada saja budaya masyarakat yang semacam itu tapi kalau dari kami, saya tidak pernah eeh apa melihat teman-teman kami ketika bekerja di lapangan tentu berusaha mencari keuntungan untuk dirinya sendiri.</p> <p>Tapi kalau dari sisi pendapatan daerah lain-lainnya, ya mungkin ada celah karena kami menerima beberapa pendapatan yang memang belum ada, istilahnya belum ada rumahnya sehingga nantinya masuk di lain-lain pendapatan yang sah dalam item kalau dulu namanya pendapatan insidental sehingga tidak ada klasifikasi ini masuk pendapatan mana itu berada. Atau kadang-kadang yang ada suatu pendapatan yang kita tidak tahu siapa yang transfer. Itu ada. Itu mungkin kesalahan dari pengirim/pentransfer maksudnya untuk bayar pajak atau bayar apa, tapi karena dalam berita itu tidak dicantumkan, hanya nama si ini, dari bank ini, dikirim sekian rupiah, tidak ada berita/keterangan ini untuk bayar ini, sehingga kami kesulitan. Masuklah dalam tempat lain-lain pendapatan yang sah. Seperti itu.</p>	<p>Diatur mas. Jadi begini loh mas. Untuk pungutan retribusi mengenai telekomunikasi seperti yang sebut tadi berdasarkan peraturan daerah yang kemudian keluarlah surat ketetapan, namanya surat ketetapan retribusi daerah. Ah semacam itu mas. Itu angkanya pasti. Semua diatur. Sekali lagi saya sampaikan di awal tadi mas, yang namanya memungut uang rakyat dalam bentuk pajak dan retribusi itu harus ada aturan dari peraturan daerah.</p> <p>Apa ya. Nah begini mas. Di dalam perda tentang pajak daerah no.6 tahun 2011 yang sekarang direvisi tapi belum jadi misalnya tidak ada yang mengatur masalah keringanan pajak. Tetapi di perbup, nah berarti kan diskresi ini. Perbup mengatur masalah keringanan pajak dengan dalih bahwa sesuai dengan ketentuan umum perpajakan pusat kemudian PP 55, itu pemerintah boleh kok memberi/mengatur masalah keringanan. Itu kan artinya diskresi ada. Seperti itu salah satu contohnya termasuk retribusi menara telekomunikasi. Diskresinya ya memberikan keringanan itu dengan peraturan bupati kemudian diatur oleh peraturan dinas kominfo.</p> <p>Kami ada kegiatan itu memang dan itu di program kami ada kegiatan itu untuk mengevaluasi dari masing-masing SKPD bahwa</p>
-------------------------------	--	---	--	---

<p>Ehhh, kalau di website-nya BKAD mestinya ada. Cuma itu apakah sudah diperbaharui atau belum, baru tahun ini. Itu dikelola oleh sekretariat BKAD. Kalau di sekretariat kan informasinya kan banyak, ya tentang pendapatan, kebijakan, dan macam-macam.</p> <p>Kalau langsung, tidak. Sebab begini mas, bahwa APBD, APBD loh, buku APBD yang di sana terletak target-target pendapatan dan pengeluaran itu adalah konsumsi publik. Memang kemudian tidak dilaporkan kemana, cuman di dalam APBD kan ada setiap tahun ada ringkasan APBD, kemudian dipublikasikan di mas media. Nah tapi bukan kami. Itu penda secara keseluruhan bersama-sama. Semacam itu. Kalau masalah apakah itu transparan, siapa pun boleh kok mas. Memang kami tidak menempelkan “ini loh targetnya sekian”. Tidak. Tapi siapa pun untuk kebutuhan mereka baik itu untuk penelitian, baik itu untuk memuaskan seseorang butuh informasi, ya tidak apa-apa. Ya kita kasih di situ. Ya begitu mas. Biasanya yang datang mahasiswa. “Pak realisasinya sudah mencapai angka berapa sekarang”. Itu pertanyaan biasa itu. Tidak ada yang ditutupi kok mas.</p> <p>Iya. Web-nya. Ya website-nya. Yang namanya APBD, angka-angka itu juga dikonsul dulu karena itu sudah, kalau sudah jadi perda APBD, ya itu sudah milik semuanya. Semua orang boleh melihat. Seperti itu.</p>	<p>sebagaimana prosedur. Jadi eh contohnya yang umum terkait semua masyarakat yang kena pajak bumi dan bangunan kan, kami menetapkan dengan SPT, surat tagihan pajak. Kalau tidak, kalau sampai batas waktu tidak, biasanya petugas kami akan secara intens akan mendatangi kepada wajib pajak kenapa tidak membayar dan sebagainya. Biasanya kalau masyarakat pada umumnya itu membayar pajaknya bagus, tidak terjadi masalah. Tunggakan itu hanya terjadi karena mungkin tidak ada di tempat orangnya, banyak punya tanah tapi di luar daerah, atau mungkin justru malah ehhh apa perusahaan-perusahaan yang kemudian, eh apa beberapa perusahaan yang kemudian mengatakan bahwa apa semacam merasa keberatan sehingga mengajukan keringanan dan sebagainya semacam itu.</p> <p>Ehhh, gini mas. Jadi kami mencatat target itu dengan perhitungan-perhitungan tertentu ya. Menganalisisnya, sehingga tercantumlah dalam APBD itu target. Pajak ini sekian, pajak ini sekian, retribusi ini sekian. Itu sudah dengan hitungan. Kalau kemudian target itu sampai waktu tertentu dievaluasi, kami ada namanya rapat koordinasi dan evaluasi realisasi pendapatan, mas. Itu mengapa tidak tercapai, sampai bulan ini kok tidak capai sesuai dengan rencana. Ha.. kami gali. Oh ternyata, misalnya ya, misalnya pajak galian C tidak tercapai ini kenapa. Maka kita lihat bahwa oh ini terjadi karena ada pelaporan yang tidak sesuai, maka kami gali kesana. Kami gali kenapa mereka tidak membayar pajak.</p> <p>Kalau di SKPD BKAD ada bendahara penerima, tapi itu di bawah sekretaris. Di bidang pendapatan namanya itu verifikasi atas SPj fungsional pendapatan. Jadi SKPD misalnya dari dinas perdagangan, itu pendapatannya masuk ke sini. Nanti kan SPj fungsional itu nanti sebagai bahan rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan tadi itu loh.</p> <p>Ya. Misalnya begini. Ah salah satu kasusnya terhadap manipulasi pendapatan tadi. Di</p>			<p>pendapatan misalnya retribusi pasar dari Dinas Perdagangan, retribusi IMB dari Dinas PU, dan seterusnya. Fungsinya hanya untuk memantau apakah ini sudah sesuai dengan rencana target atau belum. Maka kalau belum maka kita bersama-sama akan menelaah ke dalam, ada apa kok tidak tercapai. Mestinya mereka menyampaikan data dan analisa dan alasan kenapa tidak tercapai. Bahkan lebih dari target pun akan menjadi analisa kenapa lebih dari target, ada apa, sehingga ini untuk mengambil kebijakan manfaat ke depan.</p>
---	--	--	--	--

dalam peraturan bupati disampaikan bahwa SKPD pengelola pendapatan harus menyampaikan SPj fungsional ke BKAD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Iya toh. Maka kami, kami kalau sampai tanggal hampir sebelum tanggal 10, maka akan kami hubungi secara personal. Seperti itu. Itu akan memenuhi prosedur tadi kan. Setelah itu kami adakan verifikasi sehingga nanti minggu ketiga kami harus adakan rapat evaluasi tadi itu. Nah rapat evaluasi itu nanti ada misalnya kalau tidak tercapai ada apa dan sebagainya. Nah itu perlu kami sampaikan dalam rapat sehingga memang seperti itu. Itu kalau dari sisi pendapatan. Dari sisi belanja kami juga punya kegiatan sesuai dengan DPA.

Wah iya. Itu nanti yang namanya peraturan, apalagi peraturan bupati nanti produknya bagian hukum. Kalau peraturan kepala dinas itu juga nanti harus didiskusikan. Artinya harus ada semacam rapat pembahasan yang melibatkan bagian hukum sebagai ahli hukumnya di tingkat kabupaten. Bukan melulu kami sendiri. Mereka mas kalau itu secara teknis mereka. Kami ikut di dalam perdiskusian itu. Kalau semua pengelola retribusi ke sini ya kami tidak kuat karena ada banyak.

Saya pikir masyarakat itu sudah cukup sadar pajak. Sudah cukup sadar, apalagi sudah lama. Sudah sekian puluh tahun ada seperti itu. Jadi justru kalau masyarakat itu misalnya di triwulan pertama belum mendapatkan surat tagihan pajak PBB misalnya dari berjenjang ya, sampai pak Dukuh itu menanyakan “kok kami belum dapat yo?” Semacam itu mas. Biasanya kalau masyarakat malah semacam itu.

<p>11 : Iswandari Artiningsih, S.E.</p>	<p>Akhirnya kita bisanya pendampingan. Jadi, setiap saat walaupun nggak ada namanya judul kegiatan pendampingan akuntansi, kami melakukan itu. Setiap saat mereka bisa datang kemari, kerja di sini sambil kami dampingi kalau nggak tahu langsung tanya kita ajarin, oh, ini jurnalnya ini, apa, seperti itu. Kemudian kita kasih pemahaman ya akhirnya harapan kita taruhlah mereka mengerjakan karena berrobot ya, karena disuruh. Tetapi, karena berulang jadi hafal dengan sendiri da jadi bisa. Itu teknik kami di sini gitu dan sekarang teman-teman di SKPD bagus, mereka bisa ngerjain pakai Simda. Walaupun mungkin kalau diibaratnya diuji teori akuntansinya nggak terlalu.</p> <p>Tapi, kan, kalau di lapangan dalam dunia kerja itu lebih ke aplikasinya kan, applicable-nya di lapangan ya. Itu mereka lumayan bisa gitu. Jadi, kalau misalnya tahu dapat contoh oh, saya dapat hibah nih ambulance dari Pusat gitu ya, dari Kementerian. Mereka tahu kalau itu harus dicatat sebagai pendapatan di Laporan Operasional, mereka sudah tahu gitu. Terus sudah tahu kalau aset tetap itu harus disusut tahu. Karena ya itu tadi, pertama kita kasih tahu, oh, ini ada aset tetap disusut klik ini, klik ini. Tapi, lama-lama mereka karena sudah tahu nah mereka tahu. Memang ketika ada pergantian personel atau kemarin kan SKPD-nya rombak-rombak nih.</p> <p>Iya, kemudian kita kan kalau forum-forum begitu misalnya forum koordinasi dengan SKPD, oh, hari ini kita maunya koordinasi sama PPK misalnya.</p> <p>Ya, sudah kita undang semua PPK nanti kita berikan hal-hal apa yang</p>	<p>Seluruh SKPD, kita punya eee anggaran misalnya untuk rapat-rapat koordinasi. Nah, dengan anggaran yang terbatas saya bisanya tri wulan 1 kali gitu kan. Kita kumpul semua petugas SKPD nah kita materi kita berikan apa yang kita rasa urgent gitu. Misalnya sekarang oh lagi urgent misalnya penata usahaan persediaan gitu ya. Nah, pada moment itu kita ngobrolin persediaan, dari A sampai Z pelan-pelan, harapannya mereka dengar dulu kemudian sedikit-sedikit paham. Kalau ada permasalahan apa, nah itu nanti sharing-nya di sana. Jadi, benar-benar kita mengefektifkan forum-forum kayak gitu karena cuma itu yang kita punya gitu.</p> <p>Setiap saat, kita, mungkin istilahnya cuma kegiatan pendampingan gitu ya, tapi sebenarnya kita membuka pintu setiap saat monggo ke sini kalau ada kesulitan gitu. Boleh lewat telepon ataupun mau WA, mau email, boleh</p> <p>He'e, di barang saja gitu kan, kita sampaikan. Misalnya kalau kita punya forum nggih rapat semua bidang gitu ya. Nah, itu kita sampaikan, halo bidang anggaran ini ada kesalahan penganggaran loh kemarin 2017 misalnya di SKPD A harusnya ini nggak belanja modal tapi barang jasa karena, nah, teorinya kan kita sampaikan. Dan itu pembelajaran kita juga ke teman-teman di anggaran gitu.</p> <p>Dan itu juga dilakukan untuk tahun-tahun selanjutnya. Biasanyaa yang kejadian seperti itu. Terus kalau misalnya lagi nyusun-nyusun anggaran, di sana kan yang tugas ya anggaran, tugas. Nah, terus ada nih SKPD ngajuin anggaran untuk apa gitu ya, dia mungkin ragu, dia langsung konfirmasi ke aset boleh, ke sini boleh misalnya ini ada kegiatan ini loh, nganggarkan ini, rekeningnya yang pas apa ya. Kalau dia pasang rekening ini boleh nggak terus kita diskusi ke teman-teman anggaran, wah nggak, tanya dulu itu barangnya mau ke mana. Oh, diserahkan ke pihak ketiga ke kelompok tani, oh, berarti nggak boleh di belanja modal, harus di belanja barang. Karena niat awalnya memang</p>	<p>Iya, itu Permendagri 64 tapi Permendagri 64 itu kan terlalu, apa ya istilahnya, mungkin kalau dipahami oleh teman-teman pelaksana akuntansi di sini istilahnya Petugas Akuntansi di SKPD ada 45 SKPD tahun ini 2017, saya bicara 2017 ya.</p> <p>Oke, pasti sangat kesulitan sehingga kebijakan kami adalah menurunkannya menjadi Peraturan Bupati. Nanti bisa dilihat di JDIH, dulu berawal dari Nomor 24 tahun 2014.</p> <p>Maka kita bikin Peraturan Bupati. Tadi saya bilang di JDIH ada, 24 2014 perubahannya terakhir 43 2000-- saya lupa, 2016 kalau nggak salah ya, kalau nggak '15, he'e, 2000--, 2016. Terus nanti terakhir lagi kita disempurnakan terutama di akun persediaan itu di 62 2017 yang 43 tadi 2016 nanti bisa dilihat di JDIH. Kalau bukan di JDIH biasanya di uplod-nya 2 Perbub-nya dan lampirannya, yang dicermati lampirannya saja gitu.</p>	<p>He'e, jadi nggak harus mereka kerja di sini atau buka di sini. Jadi, di SKPD-nya ada, bisa gitu loh, dan nggak harus dengan laptop misalnya dengan komputer PC biasa bisa gitu. Hanya saja kalau ada trouble kesulitan ya mereka komunikasi, gitu.</p> <p>He'e, jadi, ya enak saja gitu kadang saya cuma tinggal telepon, ayo tempatmu belum ngumpul ini misalnya gitu kan, besok ya gitu, iya, atau nggak dibantu, saya telepon. Kadang kita, nggak pakai, seringnya kita jarang rapat ya.</p> <p>Nah, kalau sehari-hari itu ya sudah main telepon, telepon, mohon bantuan ini, mohon bantuan ini dan mereka iya, biasa.</p> <p>Nah, itu kan lebih enak jalannya, gitu. Terus hal-hal yang krusial kita sampaikan. Pokoknya sharing informasi di internal SKPD saya, saya juga bilang, halo bidang pajak, bidang pendapatan, bidang perben, kalau ada apa-apa saya diceritain. Jadi, saya tahu gitu kan karena informasi itu nanti harus saya sajikan di laporan keuangan Pemda.</p>	<p>Tapi, walaupun kebijakan kita sudah berbau teknis jadi bisa dikatakan ada unsur teknisnya juga. Harapan kita lebih applicable, mudah dipahami karena terus terang petugas akuntansi semua SKPD kan beragam, tidak semua orang Jurusan Akuntansi, tidak semua sarjana akuntansi. Kadang yang sarjana akuntansi atau jurusan akuntansi pun memahami akuntansi keuangan daerah itu sulit karena banyak hal-hal khusus, tidak semata-mata seperti yang kita terima di bangku kuliah dulu gitu.</p> <p>Nah, itu kita pendekatan dulu, ini masalahnya apa gitu to. Kalau nggak bisa ke sini dikerjakan di sini gitu. Ketika nanti dia oh saya masalahnya ini-ini-ini-ini misal oh saya belum selesai ini karena mungkin data dari pengurus barang SKPD-nya belum masuk.</p>
---	--	--	---	--	--

<p>kita butuhkan. Misalnya kalau akhir tahun gitu ya, ya kita bilang ayo akhir tahun kami dibantu untuk mengkondisikan SKPD-nya, koordinasi semua lini ya kan, baik barang maupun keuangan karena kita mau menyusun laporan keuangan seperti itu. Terus nanti kadang di forum, kalau kita kesulitan lagi saya lari ke atasan dong.</p> <p>Nah, itu habis pelatihan admin ketika ada ilmu baru nanti dia juga share ke teman-teman oh sekarang kalau ini, seperti ini gitu, sebenarnya harusnya begini, oh, ini nggak boleh pakai akun ini karena apa.</p> <p>Ada hal baru yang memang kita harus share ke SKPD, admin saya pulang dari BPKP.</p> <p>Karena habis ikut pelatihan, wah ini Simda 2018 ini ada hal baru nih gitu to.</p> <p>Tadi kan saya punya forum koordinasi. Nah, pada moment itu kita share apa yang baru, apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya seperti itu. Paling nggak kita sosialisasi dulu, kita minta SKPD coba.</p> <p>Oke, transparan itu ketika semua informasi disajikan secara wajar didukung bukti yang sah dan bisa diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan, menurut saya itu transparan. Jadi, tidak ada hal yang disembunyikan.</p> <p>Contoh kalau ingin diketahui berapa realisasi pendapatan dan belanja pada periode tertentu misalnya tahun 2016 gitu. Berarti kan harus nek ringkasannya mungkin bisa di upload.</p>	<p>diserahkan ke kelompok. Nah, akhirnya di sana ketika Des anggaran itu memakai informasi dari kita seperti itu. Dan itu sudah, sudah sering terjadi. Jadi, kita kasih catatannya apa, kita sampaikan gitu.</p> <p>Iya. Kadang kan saya punya anu, teman-teman sini ada grup WA yang isinya semua petugas akuntansi dan khusus buat kerjaan.</p> <p>Jarang ada orang ngobrol, nah, kalau misalnya gini, saya bilang ke teman admin bilangin ke SKPD-nya misalnya hari ini mereka harus input saldo awal, jurnalnya ini sama ini, debet ini, kredit ini. Nah, itu lewat WA sudah share dicoba bisa gitu kan. Tapi, ketika ada yang sulit monggo ke sini, nah, kayak gitu, seringnya kayak gitu.</p> <p>Ada, he'e, iya, rekonsiliasi. Kita juga minta ke SKPD lakukan hal yang sama. Kami saja di level SKPKD di level Pemda kita rekon, apa lagi mereka di SKPD.</p> <p>Kalau ada yang nggak cocok admin saya nangkap. Oh, ini kok ditutup selisih gitu ya, ya sudah.</p> <p>He'e, nah, itu kan ya karena masing-masing tadi itu komitmen, Mas. Komitmen itu dari atas sampai bawah. Atas itu ketika kita di bawah ada kesulitan ya namanya SDM mungkin ada yang bandel, ada yang gimana, kan kita ngejanya ke atas eh tolong dibina seperti itu. Kemudian misalnya dari BKD Kepegawaian BKPP dia punya mata anggaran untuk diklat, pelatihan, nah dia koordinasi dengan kita. Ayo, kita punya dana sekian mau kirim ke diklatnya Kemendagri atau ke Diklatnya PKP siapa nih yang mau disertakan ya kita kirim orang yang belum pernah diklat. Harapannya kan yo walaupun nggak maksimal tapi paling nggak ada input-lah.</p> <p>He'e, yang dia punya sub lagi, fungsi akuntansi atau bahasanya sederhana kita petugas akuntansi itu. Nah, jadi teman-teman</p>			
--	---	--	--	--

<p>Nah, tapi kita selalu mempersilakan misalnya ada peneliti atau mahasiswa atau pihak manapun, LSM pernah, mau wartawan mau lihat monggo.</p> <p>Tapi, biasanya setiap ada yang membutuhkan entah Dewan entah apa, bisa ke sini karena ketika sudah ditetapkan Perda, Perbub itu kan publik ya.</p> <p>Ini loh eee laporan kami, ya kan, nanti dia yang upload kayak gitu. Tapi, kalau yang di media itu biasanya kalau kita sudah auditif itu kita ekspose di media.</p> <p>Iya. Jadi, nanti di Agustus pertengahan kami ekspos di media massa di website tapi kalau di website ya itu ringkasannya saja karena nggak bisa semua.</p> <p>Karena Perbub-nya kan cuma bla-bla pasal-pasal. Nah, setelah turun sampai ke Perbub biasanya kita sosialisasi, sosialisasi. Kemudian kita kan pakai mediana aplikasinya Simda.</p> <p>Itu ada caranya, nah itu kita share di WA, ayo input, caranya begini, buka ini, buka ini, itu sudah lengkap di WA, dicoba dululah gitu. Ketika bisa ya sudah nggak usah ke sini tapi kalau ada kesulitan yuk ke sini.</p> <p>Sudah lama. Karena lebih efektif begitu soalnya kalau kumpul-kumpul itu nek rapat okelah, segala waktu iya.</p> <p>Kalau nek forum rapat kan kadang saya ngundang hari ini ada yang nggak bisa.</p> <p>Lebih efektif kalau pakai media sosial. Terus teman-teman di aset</p>	<p>di sini, saya terbatas bertujuh sama saya untuk 45 SKPD, 21 Puskesmas, 100 eh 300 sekolahan. Nah, itu cara kita seperti itu misalnya kayak Dindik, Dindik punya 300 sekolahan, saya kan nggak mungkin.</p> <p>300, akhirnya kita minta tolong Dindik, lakukanlah apa yang kami lakukan kepada SKPD. Jadi, kayak berjenjang, mereka paham, jadi mereka yang turun ke sekolah, mereka yang bina sekolah. Ada aplikasi segala macam di Dindik. Nah, itu karena dia tahu yang dilakukan setelah dia lihat kita melakukan apa ke SKPD. Dinas Kesehatan dia punya 21 puskesmas, saya minta, saya kalau ke sana sendiri nggak, nggak, nggak cukup nih waktu dan tenaga, uang juga nggak ada. Tolong sebagai koordinator puskesmas lakukan hal yang sama, iya, mereka koordinasi. Nah, tetapi, ketika mereka akan terjun ke sub-subnya itu mereka koordinasi dengan kita. Contoh kita sekarang kita ke Dinkes nih, saya minta data kas dong, data kas itu seharusnya seperti ini gitu ya, harus misalnya pendapatan dipisah per jenis pendapatan dan segala macamnya, kita kasih tahu. Akhirnya mereka turun ke puskesmas dengan membawa form yang sama misalnya. Nah, itu karena mereka tahu kebutuhannya dia juga to. Nah, akhirnya di puskesmas ngerjain tapi kan nggak melulu ke kami walaupun tetap kami tetap kami membuka pintu untuk puskesmas. Kadang mereka juga ada yang langsung kemari gitu kan sama saja kayak gitu. Terus aset, aset kan ada bidang aset.</p> <p>Saya nggak mungkin dong ke pengurus barang, terlalu banyak 45 SKPD, pengurus barangnya. Akhirnya teman-teman di aset bantu kami, mereka koordinasi untuk aset, untuk persediaan. Nanti hasilnya di transfer ke kita angkanya. Jadi, saya nggak pernah ngitung-ngitung aset saya nggak pernah. Karena dibantu oleh teman-teman di aset, seperti itu. Dan di sana juga ada Simda, karena hari gini kalau nggak dibantu Simda repot ya.</p> <p>Akhirnya kita bantu koordinasi, saya</p>			
--	---	--	--	--

	<p>juga sama.</p> <p>Di bidang sana ke pengurus barangnya juga. Di-share oke hari ini update Sim baru, nah itu di share, copy ini, ganti ini konviknya dan semacam itu, juga sama</p> <p>Entah besok mau pakai Harjo atau Radar Jogja kayak gitu-gitu, ada, itu tugasnya di sini. Nanti kita kerjasama sama salah satu media massa ya sesuai kemampuan kita kan karena beda kalau KR mesti beda harga sama Harjo gitu, data ekspose. Tapi, itu cuma itu kalau sudah auditif karena memang amanat peraturannya seperti itu begitu auditif diekspos, gitu.</p> <p>Kalau APBD biasanya semua SKPD 1 set punya.</p> <p>He'e, satu set punya gitu, jadi, ya gitu kalau membutuhkan bisa langsung datang ke sini gitu boleh dilihat.</p> <p>Nah, takutnya suatu saat ada ekspose ganda lah itu makanya sama Kominfo kan ada beberapa informasi yang memang tidak bisa di ekspose ketika masih sedang dalam proses. Tapi, ketika misalnya selesai auditif besok Mei jadi Perda/Perbub wah boleh itu diekspos.</p> <p>He'e, jadi, bahkan BPKP Jogja pun itu tidak boleh karena itu dari BPKP Jakarta. Jadi, Simda itu, tapi kita nggak perlu khawatir ketika misalnya ada aturan baru wah ini gimana nih mengakomidirmnya gitu kan karena setiap ada Permendagri tau PMK yang baru itu BPKP Pusat memang sudah langsung dia update.</p>	<p>ngomong sama bidang aset, tolong dong pengurus barang SKPD A dikondisikan karena datanya dibutuhkan oleh petugas akuntansi. Nah, saya ke yang PPK SKPD tadi sebagai atasannya. Saya juga menyampaikan hal yang sama tolong dikoordinir internal Njenengan antara petugas akuntansi dan barang karena datanya harus sama seperti itu dan kita ada misalnya kayak forum-forum koordinasi sampai ke PPK SKPD tadi yang bosnya.</p> <p>Nah, kita sampaikan ke mereka tapi biasanya yang menyampaikan atasan, kepala BKAD gitu ya karena levelnya biar lebih tinggi gitu to. Bahwa di sebuah SKPD koordinator ada di tangan dia gitu. Maka minta tolong kita ajarin, dulu awalnya gitu, kita ajarin, koordinasikan antara pengurus barang semua bendahara, penerimaan-pengeluaran, dan petugas akuntansi agar semua informasi itu mengalir, segala informasi mengalir. Contoh kalau ada belanja yang sudah terealisasi dilaporkanlah oleh bendahara pengeluaran ke petugas akuntansi ya walaupun dokumennya tetap dimulai dari pengeluaran tapi informasinya mengalir ke akuntansi. Karena akuntansi harus menjurnal segala macam. Nah, kalau cuma orang-orang ini yang koordinasi kan nggak maksimal akhirnya kita minta PPK SKPD-nya itu yang harusnya jadi koordinator. Dia harus mengkondisikan di SKPD-nya masing-masing, kita kasih tahu seperti itu dan alhamdulillah lumayan. Jadi, kalau misalnya ada apa-apa kita yang bersangkutan dulu, petugas yang kita kejar, ada masalah apa, kalau sampai dia yang bilang oh ya saya punya masalah ini dan tidak bisa kita bantu ternyata kok mentok nih nggak bisa, kita lari ke atasnya. Ini ada kondisi seperti ini karena ini internal Njenengan tolong diselesaikan, seperti itu gitu. Dan syukurnya jalan sih sampai hari ini, nggak pernah ada yang ibaratnya nggak terselesaikan itu nggak ada.</p> <p>Iya, kan, kepala BKAD, kan ada grup kepala-kepala. Nah, nanti komunikasinya kepala, kepala memerintahkan. Misalnya saya sudah nagih, Pak kok masuk-masuk, saya sudah</p>			
--	---	--	--	--	--

	<p>Oh, kalau yang aset persediaan kita bikin sendiri.</p> <p>Terus kalau di Dindik, Dindik itu dia punya. Jadi, karena di sana terlalu banyak to sekolahnya hampir 300 ya dia bangun sistem APBS namanya, Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah. Harapannya outputnya kan bisa mmebantu masuk ke dalam Simda.</p>	<p>nagih. Nah, nanti ditolongin eee, kepala sama kepala gitu kan. Anu loh, kami butuh data ini, kok teman-teman Njenengan kok belum, oh ya nanti dia di internal mengokondisikan sehingga nyuruh ke bawahannya dikoordinasikan selesai, angkanya masuk ke saya, seperti itu.</p> <p>Terus misalnya nek kita BKAD itu kan link kerjasamanya sama Inspektorat nah kadang kita juga koordinasi sama Inspektorat gitu kan, itu gitu loh, sudah biasa gitu.</p>			
--	---	--	--	--	--

<p>15 : Nasip, S.E.</p>	<p>Ini kemarin baru kita mengirimkan teman-teman untuk pendampingan untuk pelaksanaan Simda Pendapatan.</p> <p>Nggih, dengan itu nanti wah semua sudah, sudah masuk data ke situ. Jadi, kalau kita mau melayani Inspektorat, mau melayani BPK sudah tidak kesulitan lagi karena semua data ada di situ.</p>	<p>Kalau yang seperti waris, hibah itu kan nah memang itu tidak ada transaksi ya tidak begitu bermasalah, yang transaksi ini yang ini yang melibatkan perantara, nah ini. Tapi, eee dari kemarin-kemarin sehingga kami tidak langsung begitu percaya mereka menyampaikan bahwa Pak ini loh harga transaksi yang sebenarnya. Ternyata setelah kita cek di lapangan, nggih, itu eee bilang ke mereka eee katakan lu sudah benar, baru kemudian setelah kita panggil yang kedua dengan kita mempunyai bukti, mereka mau mengakui bahwa memang transaksinya seperti itu. Jadi, kan memang kecenderungan dari ransaksi yang melibatkan tiap itu cenderung untuk, untuk memberikan informasi yang tidak valid.</p> <p>Oh, gini, kita biasanya kalau ada permasalahan gitu, kita koordinasi dengan baik yang ada di sub bidang termasuk juga dengan teman-teman yang ada di lapangan. Kita kembali lagi ke lapangan mencari informasi yang sebenarnya, sebenar-benarnya eee sampai dengan mendapatkan nilai yang hampir mendekati. Kemudian dari eee pihak pemohon juga katakanlah kita ajak bicara kemudian nanti disepakati memang nilai yang aslinya seperti, seperti itu. Katakanlah sebetulnya di, di sana kan eee ada sudah ada nilai nggih kita temukan, katakanlah antara 300 sampai 400. Ya, kemudian eee si pemohon tadi kan katakanlah kok cuma eee 250 padahal kan nilai minimalnya 300, ya ini kita ya itu tadi kita bentuk kemudian di lapangan. Nah, memang ternyata dalam hal kondisi itu letaknya di sana tetapi karena ada (06:34) mereka berada di (06:37) sehingga nilainya memang tidak bisa sampai dengan 300. Sehingga nanti kita yo anulah, apa, agak mendekati gitu dan biasanya mereka mau menerima.</p> <p>Mungkin bidang pajak ini kan, akan mengambil kebijakan yang Pak Kepala Dinas juga harus tahu sehingga eee tadi sih memang tidak ada agenda secara tersendiri tapi memang ada kendala dari bidang pajak untuk</p>	<p>Ya, sebetulnya kan kalau menurut saya yang namanya eee, ketika sedang hal pengelolaan pajak ini eee apa yang terdata kemudian eee kita terima itu yo istilahnya ada semacam eee perimbangan gitu istilahnya dapat di, dipertanggungjawabkan. Eee mungkin perlu saya sampaikan yang namanya pajak kan tidak bisa 100% akan ditarik semua, tapi kan paling tidak kan ada, ada perhitungannya kejelasannya berapa itu yang sudah masuk kemudian berapa yang eee menjadi masih menjadi piutang. Itu yang, yang paling pentingkan di situ. Kemudian eee semua yang berkaitan dengan transparan pajak ini tentunya terkelola dengan baik, terbukukan dengan baik dan untuk eee kegiatan itu ke arah sana maka ini nanti kita akan menerapkan Simda Pedapatan.</p> <p>Eee kalau kita eee berkaitan dengan transparansi sebenarnya kita juga sudah menyampaikan eee kepada katakanlah kalau pemberitahuan kita sampai di tingkat kecamatan bahwa kita punya piutang pajak sekian. Kemudian untuk yang belum tertagih sekian itu kita sampaikan. Karena kita mau tidak mau harus minta bantuan baik dengan Pak Camat maupun Pak Kasdes karena biasanya kan masalah terjadi di tingkat padukuhan. Sehingga perlu kita sampaikan ini setiap katakanlah mungkin paling lama itu kalau yang saya alami nggih, misalnya di kecamatan itu setiap (21:34) itu nanti ada, ada evaluasi dan monitoring kaitannya dengan masalah pajak itu. Sehingga mereka selalu diberikan laporan bahwa di desa ini masih ada piutang tunggakan sekian-sekain.</p> <p>Ya, katakanlah kalau dikatakan saya butuh berapa lama eee saya tidak, tidak bisa menjawab kepastiannya gitu ya. Tapi, dengan beriringnya proses kemudian juga saya selalu eee, apa, mengalami kemudian saya mau mencari informasi yang sering terjadi sehingga saya juga tidak malu untuk bertanya sehingga saya melihatnya ya dalam waktu 1 bulan kelihatannya saya sudah, sudah, sudah bisa untuk menyesuaikan. Cuma mungkin</p>	<p>Ya, saya dan teman-teman itu selalu menyampaikan bahwa kita bekerja atas namanya bidang bukan atas nama Subdit. Karena semuanya berkaitan.</p> <p>Baik dari pendataan, pendaftaran, kemudian dari penatapan, dari dan yang terakhirnya di penagihan itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semuanya harus selalu koordinasi.</p> <p>Iya, simultan, jadi monggo karena ini merupakan suatu kerja kita bareng, kita tidak boleh terkotak-kotak. Artinya mana yang memang membutuhkan kita bantu. Kan bicara kita pada tahun ini memang begitu besar untuk dituntut kaitannya dengan masalah pendapatan. Kemudian juga kita merekrut tenaga harian lepas.</p>	<p>Iya, untuk lebih bisa mengoptimalkan karena selama ini kan eee mereka kan cuma mengirimkan laporan itu kan masih banyak yang lebih sesuai dengan hasil aslinya. Ya, sekarang kita menurunkan teman-teman tenaga harian lepas sebagai satgas untuk melakukan pendataan.</p> <p>Ya, sebetulnya eee dari BPK kemarin juga sudah ada pemeriksaan cuma kemarin yang di, yang ditanyakan BPK ini kaitannya dengan masalah yang eee pembebasan di bandara itu. Tapi, karena sudah ada surat yang pertanda tangan dari Kementerian Keuangan, yang kedua dari Gubernur, yang ketiga dari SK Bupati sehingga itu bisa menjawab bagi BPK. Kemudian yang kaitannya dengan eee, kaitannya dengan masalah eee (07:50) tadi sebetulnya kita eee sudah ada itu harga yang, yang istilahnya di pasaran nggih. Tapi, karena yang si pasarnya itu kan merupakan variasi dan juga memang kondisi di lapangan itu bisa mendukung kelihatannya sampai saat ini eee bisa diterima. Tapi--</p> <p>Nggih, tapi, harapan kami nanti tetap kita memang ada semacam eee nilai, nilai indikasi di lapangan atau zona nilai tanah tadi yang nanti segera bisa terbit dan bisa di SK-kan sehingga kita lebih kuat. Jadi, kita tidak mengada-ada.</p>
-------------------------	---	---	---	--	--

		<p>disampaikan ke Pak Kepala yang misalnya di bidang ada beberapa hal termasuk permasalahan yang sudah bisa diurai. Sehingga kita tinggal melaksanakannya.</p> <p>Memang kalau nek dipikir ya itu kan bisa terjadi kongkalikong nggih.</p> <p>Ya, tapi, harapan kami eee memang itu apa adanya dan kami berharap tidak terjadi seperti itu</p> <p>Eee, memang anu, kita kadang sebelum melakukan kebijakan itu kadang kan kita supaya lebih aman.</p> <p>Itu kan konsultasi dulu ke Inspektorat.</p> <p>Nggih, seperti apa to kalau, kalau seperti ini itu nanti kiras-kira menyalahi nggak kan gitu, kita biasanya seperti arahnya ke sana dulu. Nah, kalau memang mereka itu meng-iya-kan dan bisa menerima ya kita melanjutkan kebijakan seperti itu. Tapi kalau mereka kok yo mengindikasikan oh nggak bisa itu nanti sudah anu, nyalahin ya itu kita yo -</p>	<p>kalau ada eee permasalahan yang timbul kemudian juga katakanlah masalah yang sudah ada dan juga karakter-karakter dari anu, saya belum bisa kalau semua.</p>		
--	--	--	---	--	--